

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia yang perlu diperhatikan adalah menyangkut kesejahteraan rakyat, baik yang miskin maupun yang terbatas kemampuannya dalam teknologi dan keahlian. Pembangunan pada dasarnya merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat, bangsa dan negara karena pembangunan mengandung makna sebagai suatu perubahan untuk menjadi keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan-perubahan yang dimaksud meliputi perubahan ekonomi, politik, sosial budaya dan perubahan-perubahan dibidang kehidupan masyarakat lainnya. Salah satu perubahan yang sangat penting dalam pembangunan adalah pengurangan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam permasalahan seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penyediaan air bersih, sanitasi dan sebagainya. Kemiskinan di Indonesia dapat menurun apabila ada dukungan dan kerjasama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini melihat kondisi Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi (Fahrizen, 2012:1).

Sehubungan dengan usaha penciptaan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat miskin khususnya dan masyarakat yang susah mengakses air umumnya, yang ditandai dengan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang.

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain karena tanpa makan orang dapat bertahan hidup sampai 3-6 bulan, namun tanpa air orang hanya bertahan hidup paling lama 3 hari. Dalam tubuh manusia terdapat sekitar 50-80% terdiri dari cairan. Air digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya minum, mandi, mencuci peralatan rumah tangga, mencuci pakaian, memasak yang keseluruhannya merupakan kebutuhan pokok (Suyono, 2012:25). Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. Berdasarkan Permenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat dan dapat diminum langsung. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Keperluan manusia akan air bervariasi sesuai dengan tempat orang tersebut tinggal. WHO memperhitungkan bahwa kebutuhan air masyarakat di negara berkembang (pedesaan) termasuk Indonesia antara 30-60 liter/orang/hari, sedangkan di negara-negara maju atau di perkotaan memerlukan 60-120 liter/orang/hari (Suyono, 2012:25).

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, produktifitas dan kualitas hidup masyarakat miskin dibutuhkan suatu program dan aksi nyata dari

pemerintah pusat dan daerah dan merupakan sesuatu yang harus di prioritaskan oleh pemerintah, mengingat permasalahan yang dihadapi adalah tingginya angka diare yang disebabkan oleh rendahnya akses penggunaan air bersih. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalkan penyakit diare dan penyakit lain yang disebabkan atau ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak sehat adalah dilakukannya suatu usaha yang dikenal dengan program PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Program ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya meliputi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal, peningkatan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan layanan sanitasi (RKM BUKU I PAMSIMAS 2011;1).

Program PAMSIMAS I dilaksanakan pada tahun 2007 sampai tahun 2012 di 110 Kabupaten/Kota dari 15 Provinsi. PAMSIMAS I berhasil diterapkan pada 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) desa, terdiri dari 6.262 (enam ribu dua ratus enam puluh dua) desa reguler dan sekitar 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) desa replikasi. Program PAMSIMAS II dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Program Pamsimas II dilaksanakan di sekitar 5000 desa di 32 provinsi di 220 Kab/Kota (*internet, <http://www.ampl.or.id/program-nasional-penyedia-air-minum-dan-sanitasi-berbasis-masyarakat-pamsimas-2#> diakses pada 20 Oktober 2015*)

Adapun kriteria terpilihnya jorong/ nagari yang akan menerima program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) adalah sebagai berikut (RKM BUKU I PAMSIMAS, 2011:1) :

- a. Indeks kemiskinan Nagari yang tinggi
- b. Nagari yang terbatas akses terhadap air minum atau rawan air
- c. Nagari yang terbatas akses sanitasi
- d. Nagari dengan tingkat diare atau penyakit yang berhubungan dengan air tergolong tinggi
- e. Nagari yang belum mendapatkan proyek sejenis (air minum dan sanitasi) dalam 2 tahun terakhir

Ada 5 (lima) komponen program dalam program pamsimas yaitu; 1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah; 2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 4) Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota; dan 5) Dukungan manajemen pelaksanaan program (pedoman umum pengelolaan program pamsimas, 2013).

Program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan pinggiran agar dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target sektor air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (pedoman umum pengelolaan program pamsimas 2013;2).

Dalam kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum memiliki sarana air minum dan sanitasi (jamban keluarga) yang sehat oleh karena itu dibutuhkan

peran tenaga penyuluh kesehatan lingkungan (Promkes dan Sanitarian) supaya menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat (PHBS). Intensitas promosi dan pendekatan sosial kultural sangat perlu untuk ditingkatkan oleh berbagai pihak diantaranya aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, instansi kesehatan, instansi pendidikan dan lain sebagainya yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dalam visi dan misi yang sama pula.

Desa dengan segala bentuk kompleksitas di dalamnya akan sangat bergantung pada aparat pemerintahannya dalam memajukan kesejahteraan bagi warganya. Dengan aparat pemerintah desa yang kredibel, akuntabel dan akseptabel akan sangat memungkinkan terbangunnya suatu sistem pemerintahan yang kuat dalam membangun desanya. Berkaitan dengan Program Pamsimas peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan dalam mendorong kesadaran dan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana sanitasi (jamban keluarga) setelah air bersih dan air minum sudah tersedia dan terjangkau oleh seluruh warganya. Bentuk dorongan dapat berupa stimulasi dari desa dengan melakukan subsidi silang bagi warga tidak mampu dari hasil iuran bulanan pengelolaan air minum dari warga. Surplus pemasukan iuran bulanan dengan biaya pengelolaan dapat juga digunakan dalam menunjang pengembangan penyediaan air minum bagi warga yang belum terjangkau akses air bersih dan air minum.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah penerima bantuan program PAMSIMAS dengan sasaran jorong-jorong yang terletak di berbagai

nagari yang ada di kabupaten Tanah Datar, adapun rekapitulasi jorong yang menerima PAMSIMAS di kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Lokasi Program PAMSIMAS Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat TA.2008 s/d TA.2014

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong	Peresentase Realisasi (%)
1	Batipuh	6	15	Berfungsi baik = 13 Berfungsi sebagian = 2 Tidak berfungsi = 0
2	Batipuh Selatan	3	7	Berfungsi baik = 7 Berfungsi sebagian = 0 Tidak berfungsi = 0
3	Lima Kaum	3	5	Berfungsi baik = 4 Berfungsi sebagian = 0 Tidak berfungsi = 1
4	Lintau Buo	2	2	Berfungsi baik = 1 Berfungsi sebagian = 1 Tidak berfungsi = 0
5	Lintau Buo Utara	4	11	Berfungsi baik = 8 Berfungsi sebagian = 1 Tidak berfungsi = 2
6	Pariangan	4	5	Berfungsi baik = 1 Berfungsi sebagian = 3 Tidak berfungsi = 1
7	Rambatan	5	9	Berfungsi baik = 4 Berfungsi sebagian = 2 Tidak berfungsi = 3
8	Salimpaung	4	5	Berfungsi baik = 4 Berfungsi sebagian = 1 Tidak berfungsi = 0
9	Sungai Tarab	4	6	Berfungsi baik = 5 Berfungsi sebagian = 0 Tidak berfungsi = 1
10	Sungayang	3	3	Berfungsi baik = 3 Berfungsi sebagian = 0 Tidak berfungsi = 0
11	Tanjung Baru	1	4	Berfungsi baik = 1 Berfungsi sebagian = 1 Tidak berfungsi = 2
12	Tanjung Emas	1	1	Berfungsi baik = 1 Berfungsi sebagian = 0 Tidak berfungsi = 0
13	XX Koto	8	12	Berfungsi baik = 11 Berfungsi sebagian = 1 Tidak berfungsi = 0

Sumber : BADAN TASKIN PMPKB KAB TANAH DATAR

Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan namun berdasarkan tabel di atas hanya 13 kecamatan yang menerima program Pamsimas yang tersebar di 85 jorong dengan tingkat keberhasilan yang berbeda. Untuk melihat tingkat

keberhasilan program Pamsimas ini dibagi menjadi tiga kategori keberhasilan yang dikelompokkan oleh Badan TASKIN (Pengentasan Kemiskinan) Kab. Tanah Datar, yaitu 10%, 50%, dan 100%. Untuk 10% menunjukkan realisasi program Pamsimas *tidak berfungsi*, untuk kategori 50% menunjukkan realisasi program Pamsimas *berfungsi sebagian*, dan untuk kategori 100% menunjukkan realisasi program Pamsimas *berfungsi baik*.

Berkaitan dengan program Pamsimas yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tiga lokasi dengan persentase realisasi yang berbeda. Tiga lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

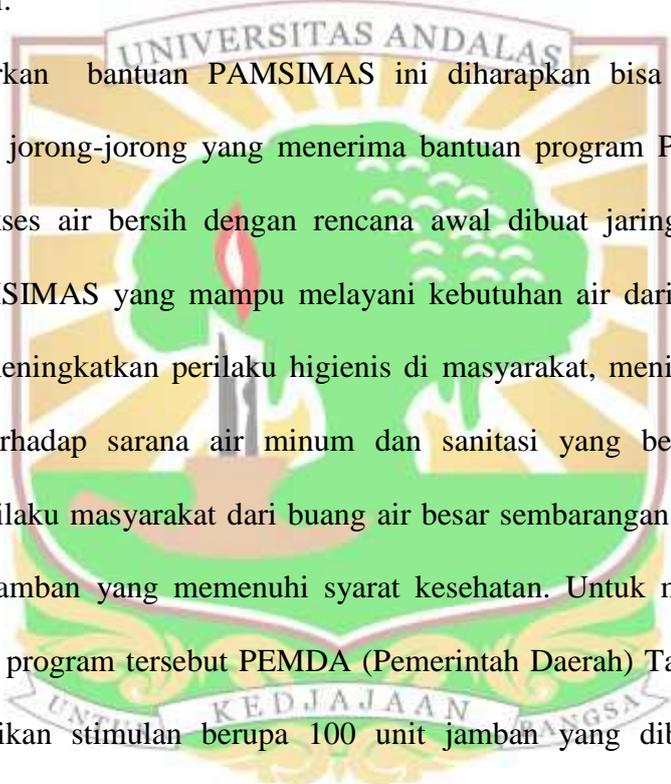
Tabel 1.2 Lokasi Penelitian

Kecamatan	Nagari	Jorong	Program	Tahun	Realisasi
Salimpaung	Supayang	Koto Dalimo	Pamsimas I	2009	Berfungsi baik
Pariangan	Simabur	Koto Tuo	Pamsimas I	2008	Berfungsi sebagian
Tanjung Baru	Tanjung Alam	Koto Sibauak	Pamsimas I	2009	Tidak Berfungsi

(Sumber : BADAN TASKIN PMPKB KAB TANAH DATAR)

Berdasarkan tabel diatas penelitian dilakukan pada tiga lokasi yang berbeda dengan pertimbangan ketiga lokasi penelitian dipilih karena memiliki persentase tingkat keberhasilan yang berbeda. Lokasi pertama berada di Jorong Koto Dalimo, Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung alasan pemilihan lokasi ini adalah karena dari 5 Jorong yang menerima program Pamsimas di Kecamatan ini terdapat 4 Jorong yang memiliki persentase tingkat keberhasilan 100% dengan kategori berfungsi baik. Untuk lokasi kedua berada di Jorong Koto Tuo , Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan alasan pemilihan lokasi ini adalah karena pada

tingkat kecamatan lokasi ini paling dominan memiliki persentase realisasi tingkat keberhasilan 50% dengan kategori berfungsi sebagian. Untuk lokasi ketiga berada di Jorong Koto Sibauak, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru alasan pemilihan lokasi ini adalah karena pada tingkat kecamatan lokasi yang mendapat bantuan program PAMSIMAS adalah sebanyak 4 jorong dan persentase realisasi tingkat keberhasilan program yang paling dominan adalah 10% dengan kategori tidak berfungsi.



Berdasarkan bantuan PAMSIMAS ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat di jorong-jorong yang menerima bantuan program PAMSIMAS ini untuk mengakses air bersih dengan rencana awal dibuat jaringan pipa untuk program PAMSIMAS yang mampu melayani kebutuhan air dari semua lapisan masyarakat, meningkatkan perilaku higienis di masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan dan perubahan perilaku masyarakat dari buang air besar sembarangan menjadi buang air besar ke jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Untuk mendukung dan mensukseskan program tersebut PEMDA (Pemerintah Daerah) Tanah Datar juga telah memberikan stimulan berupa 100 unit jamban yang dibarengi dengan pemucuan untuk rasa malu, jijik dan berdosa karena telah buang air sembarangan.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih program ini memiliki sasaran yaitu dibangunnya sebuah bak penampungan air (*reservoir*) yang kemudian dibuatkan pipa salurannya agar terdistribusi kerumah-rumah penduduk di daerah tersebut sehingga memudahkan masyarakat sekitar untuk mengakses air bersih namun program ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh

masyarakat di daerah tersebut hal ini terlihat dari perbedaan terhadap hasil dari pemantauan keberfungsian sarana air minum.

Penelitian tentang PAMSIMAS sebelumnya sudah dilakukan oleh Nur Rokhmah yang meneliti tentang pengaruh pelaksanaan program penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu mengetahui sesuatu yang sedang berlangsung kemudian mengemukakan sesuai kenyataan yang dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukkan baik dan dapat disimpulkan ada pengaruh pelaksanaan program PAMSIMAS terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya hal ini terlihat dari judul penelitian, lokasi penelitian, kajian penelitian, dan tahun penelitian. Berdasarkan survey awal peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada tiga lokasi yang memiliki perbedaan dalam realisasi program Pamsimas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Hasil Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar”*

1.2 Perumusan Masalah

Program PAMSIMAS adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Departemen Pekerjaan Umum

(PU) sebagai *executing agency* bersama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan dimana program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya program ini diharapkan bisa terealisasi sesuai dengan tujuan awal program Pamsimas namun dalam kenyataannya tidak semua lokasi penerima program Pamsimas sukses dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah

1. Apa saja faktor yang berperan dalam perbedaan tingkat keberhasilan program Pamsimas?
2. Apa yang menjadi faktor dominan yang menyebabkan perbedaan tingkat keberhasilan program Pamsimas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

Tujuan Umum

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil program Pamsimas di nagari yang menjadi objek penelitian.

Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor yang berperan dalam perbedaan tingkat keberhasilan program Pamsimas dilihat dari faktor peran badan pengelola, peran serta masyarakat, sosial budaya masyarakat, keberlanjutan sarana prasarana

penunjang, dan Pencapaian Target Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

2. Menganalisis faktor yang dominan terhadap perbedaan tingkat keberhasilan program Pamsimas.

1.4 Manfaat Penelitian

manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dua aspek yaitu:

1. Bagi Aspek Akademis yaitu Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi perspektif pemberdayaan masyarakat
2. Bagi Aspek Praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi peneliti lain, khususnya pihak-pihak yang terkait yang meneliti masalah ini lebih lanjut dan lebih dalam lagi serta sebagai bahan dan informasi pedoman bagi pemerintah, khususnya departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Kesehatan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Pendekatan Sosiologis

Mikkelsen membuat daftar atau klasifikasi dari para praktisi pembangunan mengenai arti dari partisipasi. Pertama, Partisipasi diartikan sebagai pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Pemaknaan seperti ini agaknya kurang tepat karena memaknai partisipasi hanya sekedar meminta dukungan masyarakat terhadap semua program yang telah disiapkan. Pertemuan (rapat) dengan dalih partisipasi yang dilaksanakan

tidak lebih sebagai ajang formalitas untuk menjalankan sebuah kebijakan yang telah dibuat. Hal demikian akan memunculkan partisipasi yang semu karena masyarakat tidak diberi hak untuk merancang program kecuali hanya sekedar diajak, dibujuk, diperintah dan bahkan dipisahkan oleh kelembagaan tertentu untuk ikut serta dalam suatu program yang telah dirancang sebelumnya.

Kedua, Partisipasi diartikan sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pemaknaan ini hampir sama dengan pemaknaan yang pertama, yang membedakan adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek, Karena itu akhir capaian dari partisipasi jenis ini adalah penghematan biaya. Masyarakat harus mendukung atau ikut program-program pemerintah secara gratis dengan alasan program-program tersebut pada akhirnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Proyek-proyek pembangunan yang memiliki anggaran tertentu harus dapat diselesaikan melalui penghematan-penghematan. Makin banyak penghematan atau makin murah biaya suatu proyek, maka dapat diartikan makin besar pula partisipasi masyarakat. Di sini partisipasi diartikan sebagai besarnya dana yang dapat dihemat atau dana yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

Ketiga, Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Pemaknaan seperti ini memberikan keterlibatan yang luas dalam tiap proses pembangunan yaitu mulai dari:1). Keterlibatan pada identifikasi masalah, dimana masyarakat bersama-sama dengan para perencana atau pemegang otoritas kebijakan mengidentifikasi

persoalan, mengidentifikasi peluang, potensi dan hambatan. 2).Proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana dan strategi berdasar pada hasil identifikasi sebelumnya. 3). Pelaksanaan proyek pembangunan. 4). Evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan.

Keempat, Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan sendiri. Keterlibatan sukarela itu bisa berupa terlibat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan, terlibat dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan dan terlibat dalam memilih hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Kelima, Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Partisipasi dalam pengertian ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya, bersama-sama mengupayakan jalan keluarnya dengan jalan memobilisasikan segala sumber daya yang diperlukan serta secara bersama-sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Keith Davis (dalam Surotinojo, 2009:34) dikemukakan bahwa Bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa; a) pikiran, b) tenaga, d) keahlian, e) barang dan f) uang. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut diberikan dalam tahap pembangunan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat ini dilakukan dalam berbagai cara, yaitu; a) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, b) sumbangan spontanitas berupa uang dan barang, c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri, e) sumbangan dalam bentuk kerja, f) aksi massa, g) mengadakan pembangunan di dalam keluarga dan h) membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Surotinojo, 2009:34) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud

partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Partisipasi diartikan sebagai peran aktif dalam mempengaruhi proses pembangunan serta secara bersama-sama mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat mengandung makna adanya keterlibatan aktif serta pembagian peran dan tanggung jawab diantara pelaku. Keikutsertaan masyarakat sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir yang terdiri atas proses pembentukan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.

Arnstein (1969) menggambarkan partisipasi masyarakat adalah suatu pola bertingkat (*ladder patern*). Suatu tingkatan yang terdiri dari 8 tingkat dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat. Tingkatan partisipasi masyarakat di atas bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a) Manipulasi (*Manipulation*)

Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah.

Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan “persetujuan” dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran” atau untuk merekayasa dukungan. Partisipasi masyarakat dijadikan kendaraan *public relation* oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada tingkatan ini biasanya adalah program-program pembaharuan desa. Masyarakat diundang untuk terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub komitennya. Pemegang kekuasaan memanipulasi fungsi komite dengan “pengumpulan informasi”, “hubungan masyarakat” dan “dukungan.” Dengan melibatkan masyarakat di dalam komite, pemegang kekuasaan mengklaim bahwa program sangat dibutuhkan dan didukung. Pada kenyataannya, hal ini merupakan alasan utama kegagalan dari program-program pembaharuan pedesaan di berbagai daerah.

b) Terapi (*Therapy*)

Untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan “penyakit” masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.

c) Pemberian Informasi (*Informing*)

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan tokenism. Dapat dilihat 2 karakteristik yang bercampur. Pertama, pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan

pilihan-pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat. Kedua, pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada masyarakat). Akan tetapi tidak ada umpan balik (*feedback*) dari masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media masa, pamflet, poster, dan respon untuk bertanya.

d) Konsultasi (*Consultation*)

Konsultasi yaitu mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi 2 arah ini sifatnya tetap buatan (*artificial*) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survai mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu. Masyarakat pada umumnya hanya menerima gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosur-brosur, atau menjawab sebuah kuesioner

e) Penentruman (*Placation*)

Strategi penentruman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badan-badan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka

membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada 2 tingkatan dimana masyarakat ditentramkan yaitu: kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka; dan tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut.

f) Kemitraan (*Partnership*)

Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite- komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah: adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat di mana pemimpin- pemimpinnya akuntabel; pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha- usaha mereka; dan ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer (*community organizer*) mereka sendiri.

g) Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*)

Pada tingkat ini, masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-program pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar menawar dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.

h) Pengawasan Masyarakat (*Citizen Control*)

Pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum. Pengawasan masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipan dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk menegosiasikan kondisi pada saat dimana pihak luar bisa menggantikan mereka.

Untuk mengukur skala partisipasi masyarakat dapat diketahui dari kriteria penilaian tingkat partisipasi untuk setiap individu (anggota kelompok) yang diberikan oleh Chapin (dalam Surotinojo, 2009:34) sebagai berikut:

1. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga tersebut;
2. Frekuensi kehadiran (*attendance*) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan;
3. Sumbangan/iuran yang diberikan;
4. Keanggotaan dalam kepengurusan;
5. Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan;
6. Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. keduanya harus saling mampu bekerja sama. Tanpa melibatkan masyarakat pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal. pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru dalam yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. tetapi sebaliknya ,

tanpa peranan pemerintah pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan juga terarah. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan dari banyaknya individu yang dilibatkan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan yang mereka terima.

1.5.2 Partisipasi Masyarakat dalam PAMSIMAS

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh faktor karakteristik masyarakat. Faktor-faktor tersebut menentukan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat yang berlangsung dalam suatu kegiatan. Pengaruh yang ada untuk setiap tempat adalah tidak sama, meskipun berlangsung dalam suatu wilayah yang berdekatan. Tidak hanya itu, kemampuan dari faktor untuk mempengaruhi setiap individu adalah tidak sama. Adapun karakteristik masyarakat dapat dilihat dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Kebiasaan masyarakat umum biasanya terdapat perbedaan senioritas, sehingga muncul golongan tua, muda, yang berbeda-beda dalam hal tertentu. Misalnya dalam pengambilan keputusan. Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih

berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan. Program PAMSIMAS yang berbasiskan masyarakat tidak memandang kepada golongan usia sehingga tua, muda, semua mempunyai hak yang sama dalam menyalurkan pendapat dan keputusan. Dalam Program PAMSIMAS sesuai dengan prinsip kesetaraan jender, maka program ini memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan seperti halnya laki-laki untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pengelolaan kegiatan. Faktanya kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi lebih banyak dilakukan kaum perempuan dalam aktivitas sehari-hari

Latar belakang pendidikan tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk turut berpartisipasi dalam Program PAMSIMAS, sehingga setiap individu mempunyai hak untuk berperan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing, apakah tingkat pendidikan rendah maupun tinggi, sehingga prinsip kesamaan tetap terjaga.

Program PAMSIMAS yang mempunyai sasaran kepada masyarakat miskin justru memberikan peluang kepada masyarakat lapisan bawah untuk mengambil peran lebih dominan sehingga seharusnya kemampuan finansial tidak menjadi halangan untuk berpartisipasi. Mata pencaharian seseorang berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang, oleh karena itu mata pencaharian dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang

melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan juga berinvestasi.

1.5.3 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Ruang lingkup kegiatan program Pamsimas mencakup 5 (lima) komponen kegiatan, yaitu: 1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal ; 2) Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Pelayanan Sanitasi; (3) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum; (4) Insentif Desa/kelurahan dan Kabupaten/kota; dan (5) Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek (Bappenas, 2009).

Secara umum, struktur organisasi pengelola dan pelaksana Program Pamsimas dari tingkat pusat sampai dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar berikut.

untuk komponen 1b; Direktorat Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan untuk komponen 2, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk komponen 3, 4 dan 5. IA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan komponen program yang menjadi tanggung jawabnya.

Tim Pengarah Pusat

Tugas Tim Pengarah yaitu:

1. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan air minum dan sanitasi;
2. Melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi;
3. Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran *Millenium Development Goals* bidang air minum dan sanitasi;
4. Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi dengan sumber pembiayaan dalam dan luar negeri;
5. Membentuk Tim Teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah

Tim Teknis Pusat

Tim Teknis Pusat beranggotakan eselon II dari masing-masing Ditjen Pelaksana Kegiatan, yang diangkat melalui SK Bappenas yang diketuai oleh Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, dan Pokja AMPL Pusat.

Tim Teknis Pusat bertugas membantu Tim Pengarah dalam:

1. Merumuskan kebijakan operasional dalam pelaksanaan program Pamsimas;
2. Menetapkan pedoman-pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan program, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat lain;

3. Memberikan masukan-masukan yang diperlukan kepada Tim Pengarah dalam menetapkan kebijakan program;

4. Memberi arahan kepada CPMU mengenai kebijakan pelaksanaan program serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pendayagunaan dana luar negeri;

5. Melakukan koordinasi antar kementerian terkait untuk menunjang efektivitas dan kelancaran program.

Central Project Management Unit (CPMU)

CPMU ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Berkedudukan di Ditjen Cipta Karya yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi yang terlibat dengan Program Pamsimas. CPMU dibantu oleh kepala staf CPMU, beberapa koordinator bidang, dan beberapa asisten. Koordinator bidang terdiri dari beberapa bidang sebagai berikut:

Tugas Satker Pusat:

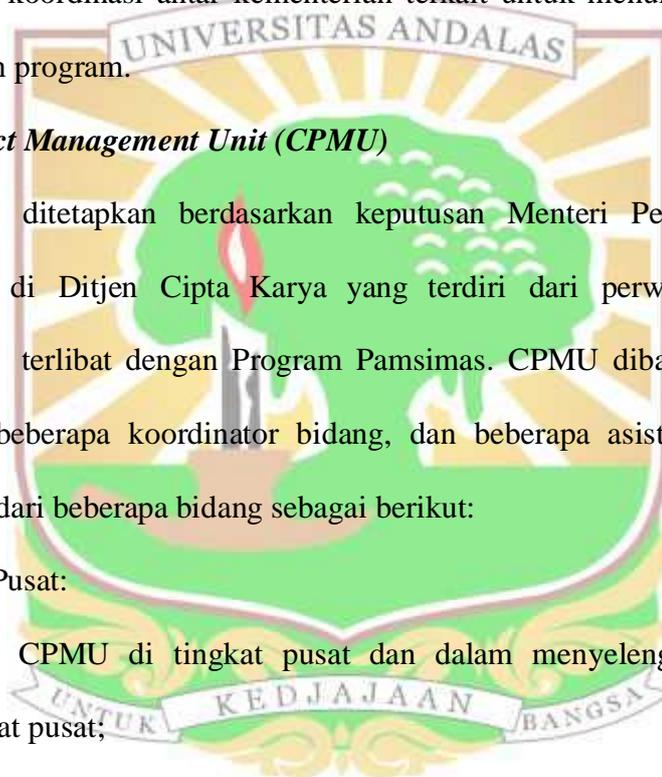
a. Mendukung CPMU di tingkat pusat dan dalam menyelenggarakan program tingkat pusat;

b. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program di pusat;

d. Merekrut konsultan manajemen pusat (CMAC);

e. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan prosedur program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;



- f. Membina satker tingkat provinsi dan satker tingkat kabupaten/kota;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi proyek;
- h. Mengumpulkan laporan pelaksanaan dan satuan kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- i. Melaporkan kemajuan penyelenggaraan kepada tim pelaksana di tingkat pusat;
- j. Mengkompilasi data dan pelaporan dari tingkat kabupaten dan provinsi, termasuk pengumpulan SP2D;
- k. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Provincial Project Management Unit (PPMU)

PPMU ditetapkan dengan SK Gubernur. Ketua PPMU (minimal setingkat kepala bidang) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/atau dengan nama lain yang menangani bidang Cipta Karya.

Kewenangan PPMU:

1. Menindaklanjuti keluhan DPMU dengan menegur FM apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur dan atau menghentikan sementara kegiatan FM di wilayah kerjanya;
2. Merekomendasikan kepada Satker Provinsi untuk melakukan pembayaran atau penangguhan pembayaran FM;
3. Merekomendasikan kepada Pokja AMPL provinsi terkait upaya penanganan keluhan yang tidak dapat diputuskan oleh Pokja AMPL Kabupaten/Kota.

Satker Provinsi

Satuan Kerja Pelaksana Pamsimas di tingkat provinsi berada di Dinas Pekerjaan Umum (atau nama lain yang membidangi Cipta Karya) dan Dinas

Kesehatan Provinsi. Satker tingkat provinsi adalah pejabat pengelola anggaran Pamsimas di tingkat provinsi, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri atas usulan Gubernur, dan diberikan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Tugas Satker Provinsi:

- a. Mendukung PPMU dalam menyelenggarakan program tingkat provinsi;
- b. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program di provinsi dan melaporkannya kepada PPMU;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan prosedur program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Memfasilitasi pengumpulan laporan pelaksanaan program di tingkat provinsi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada atasan langsung Satker yang juga disampaikan kepada Dirjen Cipta Karya;
- g. Mengumpulkan dan menyampaikan SP2D dari tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi kepada Satker Pembinaan Pamsimas dan CPMU
- h. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

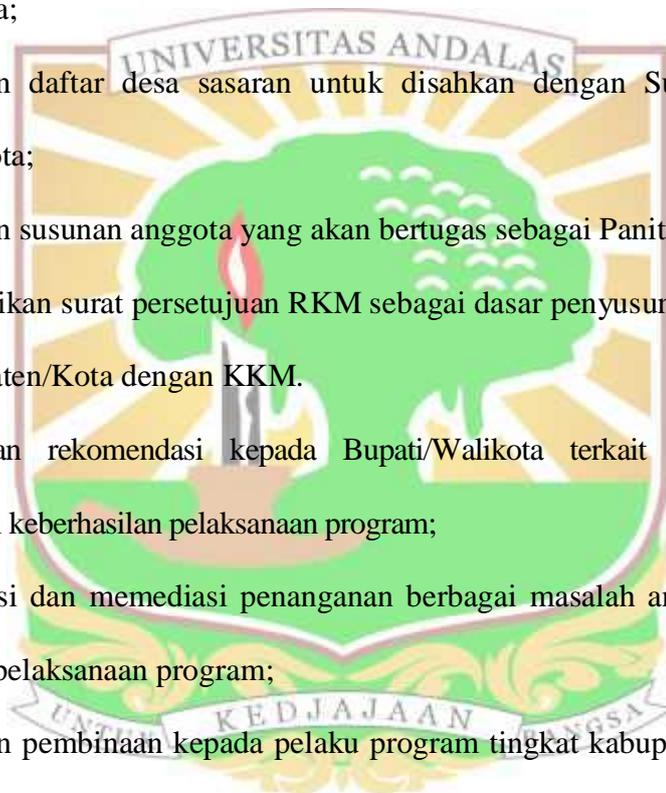
Pokja AMPL Kabupaten/Kota

Pokja AMPL Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan beranggotakan Dinas Pekerjaan Umum (atau nama lain yang menangani bidang Cipta Karya), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Bapedalda,

Dinas Pendidikan, dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan, wakil kelompok peduli AMPL, dan wakil organisasi masyarakat sipil.

Tugas POKJA AMPL :

1. Mensosialisasikan program Pamsimas kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di kabupaten/kota;
3. Menetapkan daftar desa sasaran untuk disahkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota;
4. Menetapkan susunan anggota yang akan bertugas sebagai Panitia Kemitraan;
5. Menyampaikan surat persetujuan RKM sebagai dasar penyusunan SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM.
6. Memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota terkait kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan program;
7. Memfasilitasi dan memediasi penanganan berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan program;
8. Memberikan pembinaan kepada pelaku program tingkat kabupaten/kota terkait kebijakan operasional pelaksanaan program, implementasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program;
9. Mengevaluasi kemajuan dan kinerja program dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi;
10. Memberikan pembinaan kepada BPSPAMS melalui Asosiasi SPAMS Perdesaan terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pasca konstruksi;



11. Menetapkan kebijakan bagi Pakem dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Pokja AMPL Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota;

12. Memberikan saran dan rekomendasi kepada DPMU dalam pengelolaan program dan menjamin efektifitas dan efisiensi dana bantuan luar negeri;

13. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan RAD AMPL, PJM Proaksi, Rencana Kerja BP SPAMS, dan Rencana Kerja Asosiasi BP-SPAMS;

14. Melaporkan kepada Bupati/Walikota hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Asosiasi SPAMS perdesaan

Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah wadah/forum perkumpulan dari badan/kelompok pengelola SPAMS di perdesaan (baik yang dibangun melalui program Pamsimas maupun non Pamsimas) yang mempunyai kepentingan yang sama dan berada di dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan mewakili organisasi masyarakat tingkat desa atau dusun untuk urusan air minum dan sanitasi yang diakui oleh Pemerintah Daerah setempat. Asosiasi ini dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Pembina Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah Asisten Sekretariat Daerah bidang ekonomi dan pembangunan. Tujuan utama Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah:

1. Meningkatkan cakupan layanan dan akses SPAMS perdesaan.

2. Meningkatkan kinerja BPSPAMS dan/atau pengelola SPAMS perdesaan.

Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan dibentuk untuk menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Memetakan kondisi kinerja BPSPAMS anggotanya
2. Mendampingi BPSPAMS untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan SPAMS
3. Menetapkan standar kualitas pelayanan SPAMS anggotanya
4. Memantau peningkatan kinerja SPAM dan kualitas pelayanan BPSPAMS anggotanya
5. Meningkatkan peluang kemitraan bagi peningkatan kinerja SPAM

SKPD Kecamatan

SKPD Kecamatan bertugas dalam membantu mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pamsimas pada desa/kelurahan di wilayahnya. Tugas ini dilaksanakan oleh Kasi PMD Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasi PMD Kecamatan bekerjasama dengan Sanitarian Puskesmas, Kaurbang Desa/Kelurahan, dan Pengawas Sekolah cabang Diknas Kecamatan.

Kasi PMD kecamatan bertugas mendampingi Pakem dalam melakukan verifikasi kelayakan desa sasaran, memberikan bantuan teknis dan pembinaan teknis kepada BPSPAMS, bersama-sama dengan TFM memberikan fasilitasi dan mediasi untuk membantuefektivitaskegiatan Pamsimas.

Tugas SKPD Kecamatan :

1. Merupakan mitra kerja TFM sebagai pendamping masyarakat

untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola Pamsimas.

2. Mengikuti sosialisasi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pokja AMPL
3. Memfasilitasi sosialisasi Pamsimas di tingkat desa/kelurahan bersama Panitia Kemitraan dan DPMU.
4. Membantu verifikasi usulan/proposal desa
5. Memantau BPSPAMS dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi sebagai bagian tugas pembinaan dari SKPD Kecamatan.
6. Membantu memantau penanganan dan tindak-lanjuti keluhan yang diterima.

Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam pelaksanaan program Pamsimas di tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah desa/kelurahan berperan melakukan sosialisasi, fasilitasi, mediasi, dan koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program di desa/kelurahan.

Pemerintah Desa/kelurahan, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah, bertugas untuk:

1. Memfasilitasi sosialisasi di desa/kelurahan dan memfasilitasi musyawarah desa/kelurahan dan turut menandatangani daftar hadir sosialisasi di tingkat desa/kelurahan, dalam kapasitas mengetahui;
2. Turut memfasilitasi musyawarah desa dan menandatangani BA Hasil Musyawarah Desa/kelurahan, dalam kapasitas mengetahui;
3. Turut menandatangani proposal/usulan desa/kelurahan yang ditetapkan Masyarakat, dalam kapasitas mengetahui, kemudian mengirimkannya kepada

Panitia Kemitraan.

4. Turut memfasilitasi forum musyawarah masyarakat tingkat desa untuk membentuk BPSPAMS dengan menetapkan anggota-anggota yang dipilih masyarakat, dan menandatangani hasilnya dalam kapasitas mengetahui.

5. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa.

6. Turut mengetahui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan Pamsimas yang ditetapkan masyarakat di desa.

7. Turut menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua BPSPAMS, dalam kapasitas mengetahui;

8. Turut memfasilitasi BPSPAMS untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun;

9. Turut memfasilitasi serah terima pengelolaan aset Pamsimas kepada Badan Pengelola.

10. Membantu memantau penanganan dan tindak-lanjuti keluhan yang diterima.

Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)

KKM adalah organisasi masyarakat warga (sipil) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa/kelurahan yang bersangkutan secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan gender (*gender balance*), keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin (*indigenous and vulnerable people*). Peran KKM dalam implementasi program Pamsimas adalah sebagai

pengelola. Sebagai pelaksana program dibentuk Satuan Pelaksana Program Pamsimas (Satlak Pamsimas). Proses pemilihan serta pembentukan KKM tersebut akan dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat yang akan difasilitasi oleh TFM.

Di desa/kelurahan yang sedang dan telah dilaksanakan program pemberdayaan oleh pemerintah, seperti P2KP yang telah membentuk BKM dan masih eksis dan sehat, maka tidak perlu membentuk KKM namun hanya membentuk Unit/Satuan Pelaksana Program Pamsimas yang dalam program WSLIC-2 biasa disebut TKM (Tim Kerja Masyarakat). Di lokasi yang belum terdapat BKM, maka dapat dibentuk lembaga baru yakni KKM yang berfungsi sebagai dewan masyarakat. Proses Pembentukan KKM sesuai dengan asas representative, partisipatif, akuntabel, berbasis nilai, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, dengan kriteria anggota yang lebih mengutamakan *track record* atau kepercayaan masyarakat dan menjamin keterlibatan perempuan serta warga miskin.

KKM merupakan wadah sinergi dan aspirasi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi embrio dari lembaga keswadayaan masyarakat (*civil society organization*) di tingkat komunitas akar rumput. Oleh karena itu, KKM diharapkan merupakan institusi masyarakat independen yang sepenuhnya dibentuk, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat sendiri. Anggota-anggota KKM dipilih secara langsung oleh seluruh masyarakat, dengan mengutamakan keterlibatan kelompok marjinal (wanita dan warga miskin) dan mereka bertanggungjawab langsung pula kepada masyarakat.

Untuk memudahkan administrasi program serta sejalan dengan kedudukannya sebagai institusi masyarakat yang otonom, maka legitimasi KKM adalah pengakuan, representatif dan pengakuan terhadap masyarakat, sedangkan legalisasi KKM melalui pencatatan akta notaris. KKM pasca pelaksanaan pekerjaan konstruksi selanjutnya melalui mekanisme program Pamsimas memperluas orientasinya dengan membentuk Badan Pengelola sebagai unit kerja KKM/BKM untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

Meskipun sebagai institusi masyarakat, KKM berkedudukan otonom, namun dalam pengelolaan organisasi maupun pelaksanaan kegiatan, KKM berkewajiban melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi intensif dengan Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya serta tokoh masyarakat maupun lembaga formal dan informal lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pembangunan partisipatif (*participatory development*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bahwa pembangunan akan berlangsung efektif, efisien dan tepat sasaran bila didukung dan mensinergikan potensi 3 pilar pelaku pembangunan, yakni Masyarakat, Pemerintah, dan Kelompok Peduli. Tugas KKM sebagai berikut :

- a. Dengan bimbingan TFM membuat laporan pengelolaan keuangan dengan membuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek kepada (DPMU) secara periodik
- b. Dengan bimbingan TFM membuat laporan pembangunan fisik, kegiatan pelatihan masyarakat dan program kesehatan kepada masyarakat, dan pengelola proyek (DPMU) secara periodik.

c. Bersama FM dan bekerjasama dengan "nature leader" yang ada di desa untuk melaksanakan CLTS, serta memberi penjelasan kepada masyarakat untuk memilih opsi sarana air minum, sarana air minum (di masyarakat dan sekolah) serta pelatihan.

d. Bersama TFM menyempurnakan jadwal pelaksanaan konstruksi, memeriksa kontribusi swadaya masyarakat minimal 20% (In Kind 16% dan In Cash 4%).

e. Bersama-sama masyarakat dan dibantu FM menyusun RKM I dan II; membahas, menyelesaikan RKM yang kemudian dikirim ke DPMU.

f. Mengikuti pelatihan bersama-sama masyarakat seperti:

- RRK
- RRK Pelatihan
- Teknis sarana air minum/sanitasi
- Rencana biaya pembangunan sarana air minum/sanitasi
- Rencana biaya O&P
- Rencana biaya iuran serta tata cara pengelolaan
- Rencana biaya keuangan
- Rencana pengadaan barang dan jasa (bila ada) termasuk membuat dan membaca gambar teknis, pengetahuan spesifikasi teknik, pengawasan pekerjaan, perhitungan kemajuan pembangunan fisik, administrasi dan keuangan pelaksanaan pembangunan.

g. Monitoring secara terus menerus dengan TFM terhadap pekerjaan konstruksi, material/BLM, kualitas pekerjaan, administrasi keuangan.



- h. Melakukan survey awal terhadap supplier yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang di desa.
- i. Membuat surat perjanjian resmi dengan supplier setelah masyarakat desa/kelurahan telah memilih pemenang lelang.
- j. Melaksanakan kegiatan PHBS di masyarakat.
- k. Mempersiapkan KKM membentuk unit pengelola dengan mengikuti pelatihan, dengan keberadaan dan kinerja Unit Pengelola menjadi indikator keberhasilan sarana dan program kesehatan pada tahap pasca proyek.
- l. Memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kegiatan Pamsimas ke masyarakat untuk disampaikan ke DPMU dan Pokja AMPL.
- m. Membuat SP yang ditandatangani koordinator KKM dan ketua DPMU untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota.

BPSPAMS

Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa/kelurahan. BPSPAMS merupakan lembaga yang mewakili masyarakat dimana anggotanya berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat dengan berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan, selain kemampuan yang bersifat teknis. BPSPAMS akan berperan dalam program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengoperasian dan pemeliharaan, serta dukungan keberlanjutan kegiatan program.

tugas BPSPAM sebagai berikut :

- a. Dengan bimbingan TFM membuat laporan pengelolaan keuangan dengan

membuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek kepada (DPMU) secara periodic;

b. Dengan bimbingan TFM membuat laporan pembangunan fisik, kegiatan pelatihan masyarakat dan program kesehatan kepada masyarakat, dan pengelola proyek (DPMU) secara periodic;

c. Bersama FM dan bekerjasama dengan "nature leader" yang ada di desa untuk melaksanakan CLTS, serta memberi penjelasan kepada masyarakat untuk memilih opsi sarana air minum, sarana air minum (di masyarakat dan sekolah) serta pelatihan;

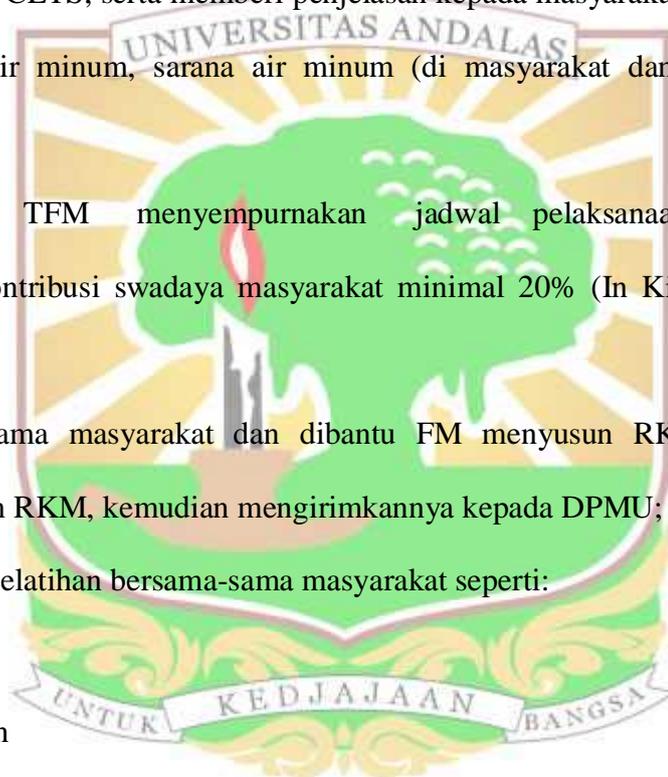
d. Bersama TFM menyempurnakan jadwal pelaksanaan konstruksi, memeriksa kontribusi swadaya masyarakat minimal 20% (In Kind 16% dan In Cash 4%);

e. Bersama-sama masyarakat dan dibantu FM menyusun RKM, membahas, menyelesaikan RKM, kemudian mengirimkannya kepada DPMU;

f. Mengikuti pelatihan bersama-sama masyarakat seperti:

- RRK
- RRK Pelatihan
- Teknis sarana air minum/sanitasi
- Rencana biaya pembangunan sarana air minum dan sanitasi
- Rencana biaya O&P
- Rencana biaya iuran serta tata cara pengelolaan
- Rencana biaya keuangan

g. Monitoring secara terus menerus dengan TFM terhadap pekerjaan konstruksi,



material/blm, kualitas pekerjaan, administrasi keuangan.

h. Melakukan survey awal terhadap supplier yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang di desa.

j. Melaksanakan kegiatan PHS di masyarakat.

k. Memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kegiatan Pamsimas ke masyarakat untuk disampaikan ke DPMU dan Pakem.

l. Membuat SP yang ditandatangani Ketua BPSPAMS dan ketua DPMU untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota.

m. Menyelenggarakan sistem operasi dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi dalam pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan.

Fasilitator Masyarakat

Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan tenaga pendamping yang telah dilatih dalam keterampilan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya dengan berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil.

Prinsip kerja fasilitator merupakan satu kesatuan tim sebagai Tim

Fasilitator

Masyarakat (TFM) yang terdiri dari 2 bidang keahlian, yaitu :

- Fasilitator bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi / *Water & Sanitation Facilitator (CF/WSS)*;

- Fasilitator bidang Pemberdayaan Masyarakat / *Community Development Facilitator (CF/CD)*.

Tugas pokok TFM adalah memfasilitasi kegiatan penilaian, analisa dan penyusunan rencana kegiatan kelompok masyarakat sebagai Rencana Strategis Program Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (ProAKSi) dengan metode MPA/PHAST (*Methodology For Participatory Assessment/ Participatory Hygiene And Sanitation Transformation*) dan Visioning. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa, terutama Tim Kerja Masyarakat (LKM) atau organisasi pengelola lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program dalam peningkatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan sanitasi masyarakat.

Bidang Tugas Tim Fasilitator Masyarakat (TFM):

- ❖ Penyiapan rencana keseluruhan dalam penyediaan layanan fasilitasi kepada desa sasaran baik rencana tim maupun rencana individu. Oleh karena itu, jadwal tentative fasilitator secara tim maupun individu harus disepakati bersama antara TFM, Koordinator Fasilitator dan Provincial Management Advisory Consultant (PMC).
- ❖ Pengumpulan/updating data primer dan sekunder secara intensif untuk keperluan monitoring yang berhubungan dengan input data indikator kunci pelaksanaan program.
- ❖ Membantu penyiapan Laporan Pelaksanaan di Desa (proses, konstruksi, dan pasca konstruksi);
- ❖ Melakukan kajian kebutuhan pelatihan masyarakat dan menyelenggarakan pelatihan masyarakat secara periodik bersama dengan DPMU dan PMC.

- ❖ Bersama Kasie pembangunan (Staff Kecamatan), dan Sanitarian melakukan promosi kesehatan dan penyadaran perubahan perilaku hidup sehat (STBM/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) kepada masyarakat sasaran.

Fasilitator Keberlanjutan

Fasilitator Keberlanjutan (FK) merupakan tenaga pendamping yang mempunyai fokus melakukan pendampingan (fasilitasi), advokasi dan peningkatan kapasitas kepada pelaku AMPL di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan dalam rangka memastikan keberlanjutan program. FK juga akan berperan dalam memberikan pembinaan teknis terhadap fasilitator masyarakat di wilayah kerjanya sehingga dapat pula disebut sebagai Fasilitator Senior yang bekerja dalam lingkup kabupaten/kota.

Pada pelaksanaan pekerjaannya FK akan terdiri dari:

- 1 orang Fasilitator Keberlanjutan bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (FK-WSS).
 - 1 orang Fasilitator Keberlanjutan bidang Pemberdayaan Masyarakat (FK-CD)
- Fasilitator Keberlanjutan mempunyai lingkup tanggung jawab pekerjaan di wilayah.

Tugas Pokok Fasilitator Keberlanjutan adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja (Workplan) yang berisi rencana dalam penyediaan fasilitasi kepada pemda, fasilitator masyarakat, dan BPSPAMS di lokasi sasaran baik secara tim maupun individu. Rencana Kerja ini harus disetujui oleh Koordinator Kabupaten dan diketahui oleh DPMU.

2. Melakukan fasilitasi terkait bidang tugasnya dengan pelaku program yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.
3. Melaporkan data indikator kunci pelaksanaan program sebagai input terhadap mekanisme pemantauan dan evaluasi program yang akan dilakukan oleh Koordinator Kabupaten.

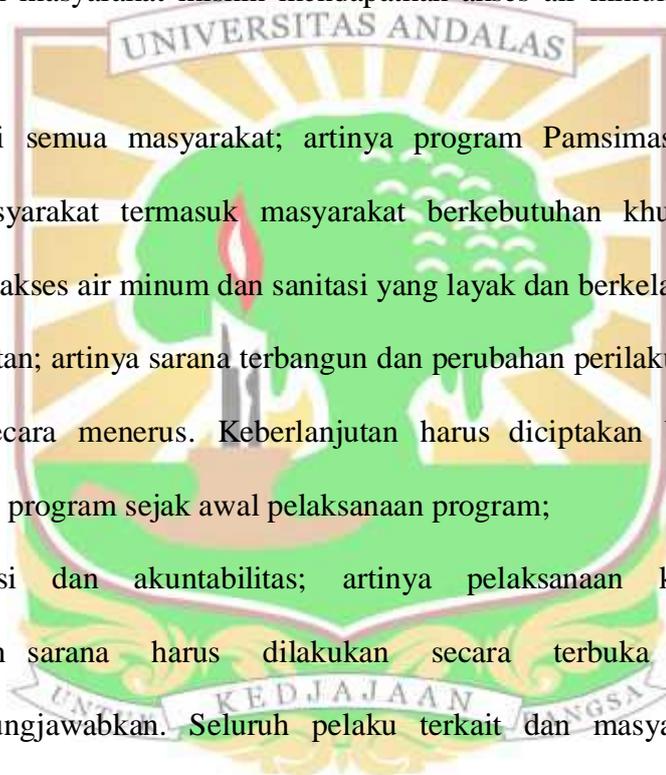
Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam program Pamsimas adalah sebagai berikut:

1. Berbasis Masyarakat; artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
2. Tanggap Kebutuhan; artinya program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan (Bantuan Langsung Masyarakat) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat.
3. Partisipatif; artinya seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan

kegiatan Pamsimas.

4. Kesetaraan gender; artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
5. Keberpihakan pada masyarakat miskin; artinya program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman.
6. Akses bagi semua masyarakat; artinya program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (*disable*) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
7. Keberlanjutan; artinya sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku program sejak awal pelaksanaan program;
8. Transparansi dan akuntabilitas; artinya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya;
9. Berbasis Nilai; artinya program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong.

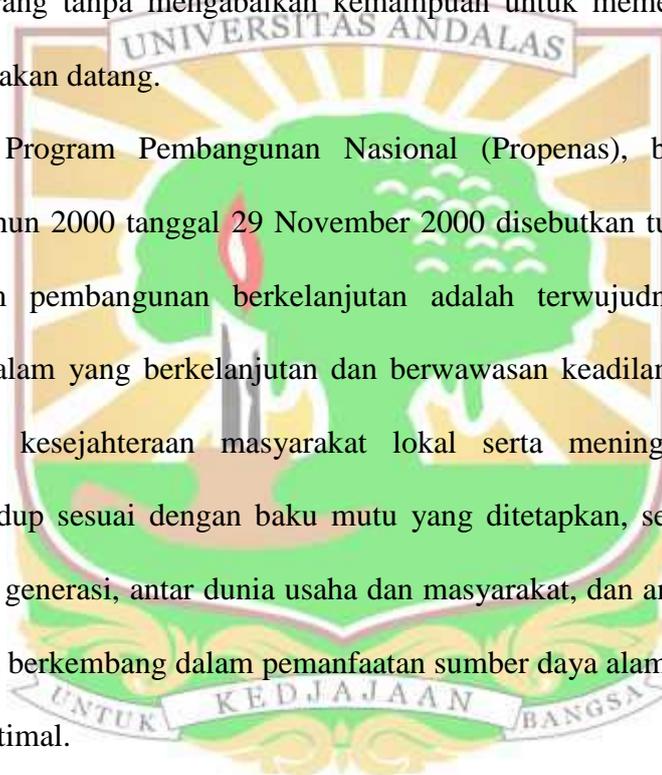


1.5.4 Kestinambungan/Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan

Kestinambungan merupakan sebuah kapasitas untuk melakukan pemeliharaan sarana dan manfaat yang dilakukan baik ditingkat masyarakat maupun agency tanpa mengganggu lingkungan, sekalipun bimbingan dari program sudah usai. Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) lebih difokuskan pada tujuan jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 29 November 2000 disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dan antar negara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

Pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar atau dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dimana ketiga pilar tersebut diterapkan secara simultan pada pengelolaan aset berupa sumber daya alam, infrastruktur dan sumber daya manusia (Siregar, 2004:56). Indikator keberlanjutan dalam sistem penyediaan air bersih perdesaan adalah kepuasan pelanggan, keuntungan finansial dan kemungkinan sistem dapat dikembangkan (Yunasrun, 2013:22).



Untuk mengevaluasi kesinambungan sebuah sarana air bersih/sanitasi ada lima indikator kunci yang perlu diperhatikan baik ditingkat masyarakat maupun tingkat perencana program (Narayan, 1993 dalam Yunasrun, 2013). Kelima indikator tersebut adalah : 1) Kualitas sistem, meliputi kualitas sumber air, jumlah pekerja dan jenis pemeliharanya ; 2) Pengembangan kapasitas manusia, meliputi kemampuan manajemen, pengetahuan dan ketrampilan serta kepercayaan pada diri sendiri ; 3)Kemampuan lembaga lokal, meliputi otonomi, dukungan pemimpin, dan sistem untuk belajar dan memecahkan masalah; 4) Pembagian unit biaya, meliputi kontribusi masyarakat, kontribusi pemerintah dan besarnya unit biaya; 5)Kolaborasi antar organisasi meliputi kegiatan perencanaan dan implementasi.

Suatu program yang dilaksanakan di masyarakat tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program. Menurut Mukherjee (2001) dalam Yunasrun (2013:24) menyebutkan ada lima faktor yang perlu diperhatikan untuk melihat dan menilai kesinambungan sebuah sarana air bersih dan sanitasi, yaitu kesinambungan teknis, kesinambungan finansial, kesinambungan kelembagaan, kesinambungan sosial, kesinambungan lingkungan.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian tentang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat pernah dilakukan oleh Nurul Suci (2015) yang berjudul, “*Kinerja BP-Pamsimas terhadap program Pamsimas di Nagari Tanjung Kabupaten Tanah Datar*”. Dalam penelitiannya Nurul Suci menggunakan konsep pengukuran indikator kerja dengan hasil temuan kinerja BP-Pamsimas jorong Balai Bungo

masih belum maksimal. Karena belum tercapainya tujuan dari BP-Pamsimas secara optimal dalam menjalankan program tersebut. Adapun kendala yang dihadapi disebabkan oleh faktor kendala dari BP-Pamsimas ataupun dari masyarakat Jorong Balai Bungo.

Penelitian relevan berikutnya dilakukan oleh Rachmawati Dwi Maharani (2014) dengan judul, *“Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Lebak”*. Adapun hasil temuan dari penelitiannya adalah dalam implementasinya belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya profesionalitas kerja dan sanksi yang tegas, keterbatasan SDM serta kurangnya keikutsertaan dari masyarakat terhadap program tersebut.

Penelitian tentang Program Pamsimas juga dilakukan oleh Yunasrun (2013) dengan judul, *“Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPSPAMS dalam mengelola aset infrastruktur air bersih perdesaan. Variabel yang diteliti berdasarkan aspek pengukuran kinerja sektor publik yaitu aspek masukan, aspek proses, aspek pengeluaran, aspek hasil, aspek manfaat, dan aspek dampak. Adapun hasil penelitian Yunasrun adalah dari analisis faktor kinerja tersebut diperoleh skor BPSPAMS di Kabupaten Padang Pariaman dengan tiga tingkatan yaitu, BPSPAMS yang tidak berkembang, BPSPAMS kurang berkembang, serta BPSPAMS yang berkembang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan campuran (mixing) yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2013:5).

Strategi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode campuran kongruen (satu waktu) merupakan prosedur dimana didalamnya peneliti mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data tersebut pada satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. Jika tidak, dalam strategi ini peneliti dapat memasukkan satu jenis data yang lebih kecil ke dalam sekumpulan data yang lebih besar untuk menganalisis jenis-jenis pertanyaan yang berbeda, misalnya jika metode kuantitatif diterapkan untuk melaksanakan penelitian, metode kualitatif diterapkan untuk mengetahui hasil akhir. Idealnya, bobot antara dua metode ini setara, tetapi dalam praktiknya, seringkali ada prioritas yang lebih dibebankan pada satu metode ketimbang pada metode lain.

Dalam strategi ini, pencampuran terjadi ketika peneliti sampai pada tahap interpretasi dan pembahasan. Pencampuran tersebut dilakukan dengan meleburkan dua data penelitian menjadi satu atau dengan mengintegrasikan hasil dari dua data tersebut secara berdampingan dalam pembahasan. Integrasi berdampingan ini banyak dijumpai dalam penelitian-penelitian metode campuran terpublikasi yang bagian pembahasan didalamnya selalu menyajikan hasil-hasil statistik (kuantitatif) terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh kuota-kuota kualitatif yang mendukung atau menolak hasil tersebut (Creswell, 2013:320). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk menjaring data awal penelitian kemudian diikuti dengan metode kualitatif yang bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi dan jawaban yang lebih mendalam terhadap pertanyaan penelitian.

1.6.2 Penentuan Responden

Responden adalah obyek penelitian yang akan dimintai data atau pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pengguna program Pamsimas, pengurus Program Pamsimas serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam program pamsimas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan. Dalam penelitian ini masing-masing jorong yang terpilih akan diambil 10% dari jumlah penduduk untuk dijadikan responden

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Lokasi Penelitian

Kategori Realisasi Program	Jorong	Jumlah Penduduk	10% Dari Jumlah Penduduk
Berfungsi Baik	Koto Dalimo	322	32,2
Berfungsi Sebagian	Koto Tuo	410	41
Tidak Berfungsi	Koto Sibauak	363	36,3

(Sumber data jumlah penduduk: Badan Pusat Statistik)

Jumlah penduduk Jorong Koto Dalimo, Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung adalah 322 orang berarti 10% dari jumlah penduduk adalah 32,2 yang dibulatkan menjadi 32 orang, untuk jorong Jorong Koto Tuo Nagari Simabur Kecamatan Pariangan adalah 410 orang berarti 10% dari 410 adalah 41 orang, sedangkan untuk Jorong Koto Sibauak, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru adalah 363 orang berarti 10% dari 363 adalah 36,3 yang dibulatkan menjadi 36 orang Jadi jumlah keseluruhan responden adalah 109 orang.

1.6.3 Data yang Diambil

Data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan antara lain data mengenai identitas dan latar belakang responden, peran badan pengelola program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, peran masyarakat setempat terhadap keberlangsungan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan hasil wawancara dari informan penelitian yang dipilih.

Selain data primer, juga digunakan data sekunder untuk memperoleh data yang lebih banyak lagi. Data sekunder adalah data yang memperkuat data primer, dimana sumber data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari hasil penelitian yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berasal dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpul data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan, keyakinan dan lain-lain dari individu atau responden (Sudjana, 2002: 21).

Pengumpulan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yang ditemui langsung di lokasi penelitian kuesioner ini dibuat untuk menyingkap data yang berhubungan dengan masalah dan fokus penelitian seperti nama, umur, pendidikan, pekerjaan, peran badan pengelola, peran masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program karena semua itu di perlukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu. Wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara. Wawancara mendalam memungkinkan ada sejumlah pertanyaan yang telah dibuat sebelum melakukan

wawancara (sering disebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban) (Afrizal, 2014 :21). Pada wawancara mendalam ini responden penelitian menjawab pertanyaan secara luas dan tidak terbatas, informan bebas menjawab pertanyaan penelitian sebanyak-banyak mungkin. Pada saat wawancara berlangsung peneliti terus menggali informasi lebih mendalam berdasarkan pedoman wawancara agar wawancara fokus kepada masalah dan tujuan penelitian.

1.6.5 Proses Penelitian

Pada bulan November peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Peneliti mencari data mengenai jumlah kecamatan, Nagari serta Jorong yang menerima bantuan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Setelah melakukan diskusi dengan pembimbing, pada bulan Desember 2015 peneliti memasukkan *TOR(Term Of Reference)* proposal penelitian ke jurusan. Dan pada bulan Desember juga SK pembimbing keluar. Setelah itu peneliti langsung melakukan konsultasi dengan pembimbing mengenai topik penelitian. Pada saat itu pembimbing memberikan banyak saran untuk kesempurnaan dalam penelitian.

Pada tanggal 14 Juli 2016 peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk menyebarkan kuesioner yang telah peneliti rancang sebelumnya. Setelah sampai di lokasi peneliti pertama yaitu di Jorong Koto Dalimo, Nagari Supayang,

Kecamatan Salimpaung langsung mengunjungi salah seorang pengelola program Pamsimas yang berada di lokasi tersebut. Responden sangat antusias untuk mengisi kuesioner yang peneliti berikan dan juga peneliti memberikan beberapa pertanyaan agar peneliti mendapatkan jawaban secara mendalam, karena dia mengira peneliti adalah bagian dari LSM yang akan memberikan bantuan terhadap pemanfaatan Program tersebut. Setelah peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti adalah untuk mencari data mengenai faktor yang memengaruhi perbedaan hasil program Pamsimas barulah peneliti meminta kesediaan informan untuk dijadikan sebagai informan penelitian. Setelah itu proses pengisian kuesioner dan wawancara pun berlangsung. Pengisian kuesioner tidak diserahkan kepada responden, tetapi di pandu dan dibacakan oleh peneliti berdasarkan item pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner. Pertanyaan yang diajukan mencakup karakteristik responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi pribadi responden. Pertanyaan tentang peran pengurus PAMSIMAS bertujuan untuk memperoleh data mengenai kinerja dari pengurus PAMSIMAS. Pertanyaan tentang peran serta masyarakat bertujuan untuk memperoleh data tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PAMSIMAS, serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan seperti sosial budaya masyarakat, ketersediaan sarana prasarana penunjang program PAMSIMAS, serta pencapaian target dari program PAMSIMAS. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya fokus kepada jawaban dari responden karena ada beberapa item pertanyaan yang dirasa peneliti penting dan ditanyakan kepada responden dengan cara wawancara. Pelaksanaan pengisian kuesioner peneliti lakukan di rumah informan. Peneliti

melakukan penelitian setiap dari jam 10.00 WIB sampai jam 17.00 WIB. Kendala yang ditemukan saat melakukan penelitian adalah pada awalnya ada beberapa responden tidak mau jujur ketika peneliti wawancarai karena menganggap peneliti adalah utusan dari Pemerintahan namun setelah peneliti menjelaskan tujuan peneliti dan memperlihatkan surat izin penelitian barulah responden tersebut menceritakan apa yang terjadi sebenarnya ketika pelaksanaan program Pamsimas

1.6.6 Unit Analisis

Dalam suatu penelitian unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga, (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas. Namun, dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu yang terlibat dalam kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat baik itu sebagai pengurus ataupun anggota yang bekerja dalam pelaksanaan program tersebut, serta individu yang memanfaatkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebagai sarana penyediaan air bersih.

1.6.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dengan cara menganalisa data berdasarkan pendekatan kuantitatif (analisis angka-angka secara deskriptif dan inferensial) dan analisa data berdasarkan pendekatan kualitatif (deskripsi dan analisis teks atau gambar secara tematik). Analisa data berdasarkan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif. Penyajian

data dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel distribusi frekuensi, tabulasi silang, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan data melalui perhitungan rata-rata data sampel atau populasi, standar deviasi, dan perhitungan persentase.

Analisi data berdasarkan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini tidak dimaksudkan menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi hanya menggambarkan gejala sosial melalui kecenderungan persentatif yang ditampilkan dalam tabulasi silang. Disebabkan penelitian ini tidak didisain untuk mencari hubungan, adapun kuesioner yang disiapkan berskala nominal yang jawabannya disediakan, namun tidak memiliki nilai pengukuran dan sifatnya membedakan alternatif jawaban tersebut.

Setelah analisa data berdasarkan pendekatan kuantitatif dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan analisa data berdasarkan pendekatan kualitatif. Dalam buku Miles dan Huberman analisis memiliki arti yang luas, yang meliputi penyederhanaan data, penyajian data, dan yang pada umumnya dimaksudkan sebagai “analisis” (Miles dan Huberman, 1992:6). Analisis data berdasarkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini lebih ditekankan pada interpretasi kualitatif. Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*field note*). Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah itu dikumpulkan dan dipelajari sebagai kesatuan yang

utuh kemudian baru dianalisa dan peneliti harus mulai menganalisisnya selama proses penelitian berlangsung (Afrizal, 2014:54).

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ada tiga lokasi yang berbeda yang berada di Kabupaten Tanah Datar yaitu :

1. Jorong Koto Dalimo, Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung
2. Jorong Koto Tuo, Nagari Simabua, Kecamatan Pariangan
3. Jorong Koto Sibauak, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru

Alasan pemilihan ketiga lokasi ini adalah karena lokasi ini memiliki realisasi persentase hasil yang berbeda terhadap pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

1.6.9 Definisi Operasional Konsep

Ada beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini, karena itu perlu diberikan batasan untuk mempermudah memahaminya. Definisi konsep ini merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur variabel yang digunakan. Untuk menghindari kerancuan dalam pemakaian konsep, maka perlu didefinisikan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

Konsep-konsep yang dimaksudkan adalah:

1. Partisipasi masyarakat

bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui; sosialisasi program, pembangunan sarana air bersih, pembentukan badan pengelola, pemeliharaan dan pengelolaan sarana, dan kesinambungan program.

3. Peran badan pengelola

Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Apakah suatu peran yang baru bersifat pura-pura atau sungguh-sungguh, kita harus menganalisis perilaku kita sendiri serta perilaku orang lain (Horton, 1999:119) . Apabila dikaitkan dengan konsep peran badan pengelola maka peran badan pengelola adalah seperangkat harapan yang diberikan kepada orang-orang yang telah dipilih untuk mengelola keberlangsungan program Pamsimas dalam operasional dan pemeliharaan, dimana orang-orang ini dipilih oleh masyarakat setempat yang berfungsi untuk keberlanjutan sarana dan prasarana penyediaan air bersih.

4. Peran serta masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Apakah suatu peran yang baru bersifat pura-pura atau sungguh-sungguh, kita harus menganalisis perilaku kita sendiri serta perilaku orang lain (Horton,

1999:119). Apabila dikaitkan dengan konsep peran serta masyarakat maka peran serta masyarakat adalah seperangkat harapan kepada anggota masyarakat agar memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan dari program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat .

5. Sosial Budaya Masyarakat

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat (Horton, 1999:66). Salah satu bagian dari kebudayaan adalah kebiasaan dimana kebiasaan hanyalah suatu cara yang dianggap lazim yang wajar dan diulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Apabila dikaitkan dengan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) maka aspek sosial budaya dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menyangkut kepada kebiasaan dan pola hidup mereka apakah termasuk dalam pola hidup bersih atau kurang bersih.

6. Sarana Prasarana Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak sedangkan prasarana ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Adapun sarana dan prasarana dalam penelitian ini adalah bangunan program PAMSIMAS, air bersih yang digunakan serta informasi secara tertulis yang berkaitan dengan keberlangsungan program.

7. Tingkat keberhasilan

pencapaian target dari program Pamsimas berdasarkan rencana awal dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tingkat keberhasilan dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu program berfungsi baik, berfungsi sebagian dan tidak berfungsi

8. Penyediaan air bersih

Suatu sistem suplai air bersih yang menggunakan jaringan perpipaan, dapat dikerjakan dan pada umumnya mampu dikerjakan oleh masyarakat secara mandiri serta memiliki teknologi yang relatif sederhana. Sistem ini meliputi air baku, distribusi dan pelayanan.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan semenjak penulisan *tor* bulan Desember 2015 kemudian peneliti mulai melakukan penulisan proposal penelitian yang dimulai dari bulan Desember 2015 hingga bulan Maret 2016, kemudian proposal yang telah peneliti buat disidangkan pada bulan April 2016. Setelah seminar proposal peneliti mulai melaksanakan penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan Juli 2016 hingga Agustus 2016, setelah mendapatkan data di lapangan peneliti melanjutkan penulisan skripsi yang juga dibarengi dengan bimbingan dan konsultasi bersama dosen pembimbing hingga skripsi yang peneliti tulis siap untuk disidangkan.

Tabel 1.4 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2016				
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Penelitian Lapangan	■	■			
2	Bimbingan penulisan Skripsi		■	■	■	■
3	Ujian Skripsi					■

